

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Gerakan buruh memiliki hubungan historis yang kuat dengan perkembangan politik di suatu negara. Gerakan ini mencerminkan dinamika kemasyarakatan sebagai respons terhadap eksploitasi sistem kapitalisme dan kolonialisme. Secara historis, kaum pekerja memulai gerakan buruh melalui protes yang menolak reduksi martabat manusia semata-mata sebagai alat produksi demi keuntungan pemodal, sehingga memicu perlawanan kolektif untuk menuntut keadilan, kelayakan upah, dan hak-hak normatif.¹ Dalam konteks sejarah perburuhan di Indonesia, perwujudan eksploitasi kolonial tersebut mulai terlihat nyata melalui penerapan kebijakan *Agrarische Wet* tahun 1870.²

Kebijakan ini membentuk embrio kesadaran kelas di Indonesia dengan mengubah kaum bumiputera secara paksa menjadi buruh upahan di perkebunan dan pabrik milik Eropa.³ Proses sejarah ini kemudian mengaitkan gerakan buruh di Indonesia dengan pergerakan kemerdekaan nasional, di mana serikat-serikat buruh awal seperti *Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP)⁴ berkembang menjadi organisasi militan berhaluan kiri yang turut mewarnai konstelasi politik perburuhan pada masa selanjutnya.⁵

¹ Suhari Ete, *"Buruh Indonesia Perdjoeangan Dari Masa ke Masa"*, (Jakarta: Triwarna Media Publishing, 2016), hlm. 1-2.

² Kebijakan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) yang dikeluarkan pada tahun 1870 merupakan tonggak penting yang menandai berakhirnya sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) dan dimulainya Jaman Liberalisme di Hindia Belanda. Inti dari kebijakan ini adalah memberikan kewenangan dan izin kepada para kapitalis serta pengusaha perkebunan swasta Eropa untuk menyewa tanah secara jangka panjang hingga 75 tahun, yang dikenal dengan sebutan hak *erfpacht*.

³ Soegiri DS dan Edi Cahyono, *"Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru"*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 11-12.

⁴ *Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP) merupakan serikat buruh pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1908 di Semarang. Pada awal pembentukannya, organisasi ini diinisiasi oleh para pegawai perkeretaapian dan trem asal Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, VSTP membuat gebrakan historis dengan menjadi serikat buruh pertama yang membuka keanggotaan bagi kaum bumiputera tanpa membedakan ras, golongan, jenis pekerjaan, maupun pangkat. Keterbukaan dan kesetaraan ini membuat VSTP berkembang pesat dan berhasil membangun basis massa yang sangat masif di kalangan kelas pekerja transportasi di seluruh Jawa.

⁵ Vedi R. Hadiz, *"Buruh dan Negara di Indonesia"*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 83.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan hingga masa Orde Lama, dominasi SOBSI⁶ yang membawa dan menyebarkan ideologi Marxisme-Leninisme memicu kekhawatiran yang sangat mendalam di kalangan tokoh-tokoh pergerakan Islam, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar yang memiliki basis massa sangat luas di wilayah pedesaan dan sektor agroindustri peninggalan era kolonial, NU merasa perlu secara institusional membentengi warganya dari infiltrasi ajaran komunis yang kian masif. Keinginan mendesak untuk membentuk wadah perjuangan kaum buruh yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman tersebut akhirnya disuarakan secara resmi melalui ketetapan Muktamar NU ke-20 di Surabaya pada tahun 1954.⁷

Menindaklanjuti amanat Muktamar ke-20 tersebut, para tokoh NU di berbagai daerah mulai mengonsolidasikan dan merajut kembali berbagai serikat buruh lokal yang sebelumnya telah didirikan secara sporadis oleh warga Nahdliyin.⁸ Puncak dari proses konsolidasi kelembagaan tersebut terjadi pada tanggal 10 September 1955, bertempat di area Pabrik Gula Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di mana secara resmi dideklarasikan berdirinya Sarikat Buruh Muslimin Indonesia atau yang disingkat Sarbumusi. Pendirian organisasi Sarbumusi menjadi tonggak sejarah dimulainya keterlibatan formal kelompok santri dalam kancah politik perburuhan tingkat nasional.⁹

Secara konseptual, Sarbumusi berlandaskan pada ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah*¹⁰ yang menempatkan kesetaraan kontrak perlakuan antara majikan dan

⁶ Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) adalah serikat buruh terbesar yang pernah ada di Indonesia pada masa Orde Lama. Secara resmi SOBSI menyatakan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, namun sepanjang dekade 1960-an para pemimpin utamanya didominasi kader-kader Partai Komunis Indonesia (PKI), yang secara praktis membawa SOBSI dekat dengan PKI.

⁷ PBNU, *Notulen Verslag Sementara Mu'tamar NU Ke-20 di Surabaya*.

⁸ Nahdliyin adalah istilah bagi kalangan muslim yang bergabung atau mengikuti Nahdlatul Ulama (NU), baik secara struktural maupun kultural.

⁹ Sutanto Martoprasono, *"Sambutan Pada Hari Sarbumusi ke-XV di Hotel Indonesia Jakarta"*, dalam *"nasib kaum buruh ada ditangan kaum buruh sendiri"*, (Jakarta: Biro Penerangan DPP Sarbumusi, 1970), hlm. 1.

¹⁰ *Ahlussunnah wal Jamaah* (sering disingkat Aswaja) adalah kelompok mayoritas dalam agama Islam yang senantiasa berpedoman pada ajaran Nabi Muhammad saw dan jalan para sahabatnya.

buruh, serta secara tegas menolak ideologi komunisme maupun sekularisme.¹¹ Di bawah kepemimpinan pertamanya, yakni Moertadji Bisri, Sarbumusi berfokus pada fase krusial pembentukan, penertiban tata kelola administrasi, dan konsolidasi organisasi yang berpusat di Surabaya. Pada periode awal ini, Sarbumusi berupaya keras meletakkan fondasi institusional yang kuat, mendorong representasi politik kaum buruh di pemerintahan, serta aktif melakukan advokasi sengketa perburuhan di tingkat basis.

Eksistensi Sarbumusi kemudian mencapai puncak kejayaannya pada dekade 1960-an di bawah komando kepemimpinan K.H. Masykur. Pada masa krusial tersebut, markas besar Sarbumusi dipindahkan ke Jakarta dan struktur organisasinya ditata secara rapi menjadi federasi yang sukses menghimpun banyak anggota buruh yang tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari perkebunan, perbankan, hingga transportasi dan kemaritiman.¹²

Selain mendominasi kancah perburuhan nasional, kiprah Sarbumusi turut merambah panggung diplomasi internasional, salah satunya ditandai dengan pencapaian memimpin delegasi buruh Indonesia di forum persidangan *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 1968.¹³ Namun, meletusnya tragedi Gerakan 30 September (G30S/PKI) tahun 1965 mengubah secara radikal konstelasi perburuhan nasional, di mana elemen-elemen non-SOBSI secara taktis harus mengambil peran sentral bersama Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh komunis di sektor perburuhan.¹⁴

Beralihnya kekuasaan ke tangan rezim Orde Baru yang didominasi oleh institusi militer membawa paradigma baru, yakni memprioritaskan stabilisasi politik untuk menopang iklim investasi ekonomi, di mana pergerakan serikat buruh

¹¹ Af Sigit Rochadi, *Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia*, dalam Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V Vol. 1 (Padang: 2016), hlm. 8-9.

¹² DPP Sarbumusi, *50 Tahun Sarbumusi Berkhidmah kepada Kaum Buruh*, (Jakarta: DPP Sarbumusi, 2005), hlm. 3.

¹³ *International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional adalah sebuah badan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan dan perburuhan global.

¹⁴ Vedi R. Hadiz, *Buruh dan Negara di Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 136-137.

independen dipandang sebagai ancaman utama bagi stabilitas tersebut.¹⁵ Rezim ini kemudian mengintrodusir doktrin Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) untuk meredam potensi pemogokan dan secara sistematis melakukan depolitisasi gerakan buruh ke dalam kendali negara.¹⁶

Di tengah iklim perpolitikan yang semakin represif tersebut, estafet kepemimpinan pengurus pusat Sarbumusi diampu oleh Drs. Sutanto Martoprasono yang menjabat mulai tahun 1969. Sarbumusi di bawah arahnya sempat bersikap sangat vokal menentang kebijakan asas monoloyalitas pembentukan Korps Karyawan (KOKAR) yang secara inkonstitusional memisahkan pegawai negeri sipil dari keanggotaannya di serikat buruh independen. Meskipun mendapat resistensi argumentatif, aparat pemerintah terus mengakselerasi proyek depolitisasi gerakan buruh tersebut secara lebih sistematis.¹⁷

Operasi intelijen negara yang diorkestrasi oleh badan Opsus pimpinan Jenderal Ali Moertopo akhirnya memaksa seluruh serikat buruh independen untuk dilebur dan diintegrasikan ke dalam satu wadah tunggal bentukan pemerintah, yakni Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada tanggal 20 Februari 1973.¹⁸ Peleburan paksa ini secara mutlak membekukan kemandirian fungsional maupun struktural Sarbumusi di atas pentas nasional, meskipun kader-kader di daerah seperti di wilayah Jawa Tengah berupaya bertahan keras dengan mengamankan posisi di dalam struktur FBSI tingkat lokal.¹⁹

Cengkeraman negara terhadap buruh semakin kuat tatkala Menteri Tenaga Kerja, Sudomo, merestrukturisasi kelembagaan FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada tahun 1985, melarang penggunaan kata “buruh” karena dianggap berkonotasi radikal, dan menggantinya dengan sebutan “pekerja” atau “karyawan”.²⁰ Kondisi perubahan doktrin ini menyebabkan eksistensi historis

¹⁵ Vedi R. Hadiz, *“Buruh dan Negara di Indonesia”*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 117-119.

¹⁶ Vedi R. Hadiz, *“Buruh dan Negara di Indonesia”*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 126-127.

¹⁷ Vedi R. Hadiz, *“Buruh dan Negara di Indonesia”*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 132-133.

¹⁸ Vedi R. Hadiz, *“Buruh dan Negara di Indonesia”*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 144.

¹⁹ Arsip NU No. 2940 dalam bentuk arsip tekstual, (Arsip Nasional Republik Indonesia).

²⁰ Vedi R. Hadiz, *“Buruh dan Negara di Indonesia”*, (Jakarta: KPG, 2024), hlm. 178-180.

Sarbumusi semakin dipaksa tenggelam ke dalam arsitektur wadah tunggal korporatisme eksklusiver Orde Baru.

Merespons kelompok wadah advokasi buruh formal tersebut, Nahdlatul Ulama merumuskan strategi kultural dengan membentuk Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTK) NU pada Mukhtamar tahun 1994 di Cipasung. Lembaga ini difungsikan cerdas sebagai instrumen bayangan yang legal untuk membina dan melindungi kaum pekerja Nahdliyin tanpa harus berbenturan langsung dengan pembatasan hukum wadah tunggal rezim.²¹ Siasat ini menjadi amat vital mengingat penanganan konflik industrial oleh negara saat itu kerap menggunakan cara militeristik yang fatal, seperti tragedi pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada Mei 1993.²²

Tata kelola eksploitasi struktural Orde Baru pada akhirnya runtuh berkeping-keping tatkala badai krisis finansial kawasan Asia menghantam perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Depresiasi Rupiah yang ekstrem melumpuhkan industri manufaktur dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang merenggut mata pencaharian jutaan buruh tanpa jaring pengaman sosial. Akumulasi kemarahan massa sipil ini memuncak pada eskalasi gerakan reformasi yang berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.²³

Era Reformasi membawa semangat baru bagi kebebasan berorganisasi, terutama setelah pemerintah transisi meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 yang serta-merta menghancurkan sistem serikat buruh tunggal.²⁴ Momentum ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh historis Sarbumusi dengan menyelenggarakan forum Silaturahmi Nasional pada 26 Juni 1998 di Ciganjur untuk mendeklarasikan kebangkitan kembali organisasinya. Di bawah kepemimpinan transisi Drs. H. Sutanto Martoprasono, konstitusi AD/ART segera dirumuskan ulang pada 10 Juli

²¹ PBNU, *"Hasil Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama"*, (Jakarta: Penerbit Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 1996), hlm. 109.

²² Suhari Ete, *"Buruh Indonesia Perdjoeangan Dari Masa ke Masa"*, *op.cit.*, hlm. 113-114.

²³ Kevin O'Rourke, *"Reformasi: The struggle for power in post-Soeharto Indonesia"*, (Maryborough: Allen & Unwin, 2002), hlm. 133-134.

²⁴ Soegiri DS dan Edi Cahyono, *"Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru"*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 128.

1998 untuk mengembalikan arsitektur operasional organisasi ke dalam bentuk federasi.²⁵

Ikhtiar panjang pemulihan kelembagaan ini mencapai garis akhirnya pada perhelatan Mukhtar NU ke-31 tahun 2004 di Boyolali, di mana status Sarbumusi secara resmi dipulihkan sebagai Badan Otonom (Banom) NU, bersamaan dengan rotasi kepemimpinan definitif kepada H. Djunaedi Ali.²⁶ Pada rentang waktu 2004-2010, Sarbumusi memfokuskan pergerakannya pada konsolidasi basis massa,²⁷ dan menyatakan sikapnya dengan menolak keras kebijakan pemerintah tentang sistem kerja buruh kontrak²⁸ dan sistem kerja alih daya (*outsourcing*).²⁹

Estafet perjuangan ini kemudian dilanjutkan oleh H.M. Syaiful Bahri Anshori sejak tahun 2010, yang menyadari urgensi restrukturisasi kelembagaan organisasi untuk menghadapi kompleksitas dan kerasnya pasar bebas global.³⁰ Visi strategis tersebut bermuara pada keputusan historis untuk merestrukturisasi wujud kelembagaan dari Federasi menjadi Konfederasi, yang secara paripurna diratifikasi melalui perhelatan Kongres Akbar V pada bulan Mei 2016,³¹ hingga akhirnya Sarbumusi secara sah mengukuhkan dirinya sebagai serikat buruh berbentuk Konfederasi berdaulat pada bulan September 2016.³²

Dinamika perjalanan panjang yang berliku, mulai dari era keemasan di masa Orde Lama, kelumpuhan akibat represi Orde Baru, hingga kebangkitan dan

²⁵ DPP Sarbumusi, *"50 Tahun Sarbumusi Berkhidmah kepada Kaum Buruh"*, (Jakarta: DPP Sarbumusi, 2005), hlm. 7.

²⁶ Eka Fitri Rohmawati, dkk., *"Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali"*, (Jakarta Pusat: DPP Konfederasi Sarbumusi, 2015), hlm. 58.

²⁷ Alfanny, wawancara, 12 Juni 2026.

²⁸ Puji Utomo, *"Sarbumusi Tolak Sistem Kontrak Buruh"*, nu.or.id, 2004, <https://www.nu.or.id/warta/sarbumusi-tolak-sistem-kontrak-buruh-R3dBu>, diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 16.15 WIB.

²⁹ A. Khoirul Anam, *"Sarbumusi Sidoarjo Minta Sistem Kerja 'Alih Daya' Diharamkan"*, nu.or.id, 2009, <https://www.nu.or.id/warta/sarbumusi-sidoarjo-minta-sistem-kerja-amp8216alih-dayaam-p8217-diharamkan-8PWkd>, diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 17.20 WIB.

³⁰ Gatot Arifianto, *"Sarbumusi: Rakyat Indonesia Jangan Jadi Penonton di Negeri Sendiri"*, nu.or.id, 2015, <https://islam.nu.or.id/nasional/sarbumusi-rakyat-indonesia-jangan-jadi-penonton-di-negeri-sendiri-DNXLs>, diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 06.31 WIB.

³¹ Sukitman Sudjatmiko, *"Buku Panduan Seri 1: Mengenal Serikat Buruh (Sarbumusi)"*, (Jakarta Pusat: DPP Konfederasi Sarbumusi NU, 2017), hlm. 35.

³² Gatot Arifianto, *"Ketum PBNU Kukuhkan DPPK Sarbumusi 2016-2021 Siang Ini"*, nu.or.id, 2016, <https://nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-kukuhkan-dppk-sarbumusi-2016-2021-siang-ini-sRp0w>, diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 07.13 WIB.

transformasi wujud organisasi di masa Reformasi inilah yang memberikan landasan urgensi historis bagi penulis untuk meneliti eksistensi Sarbumusi. Secara komprehensif, eksistensi Sarbumusi merupakan potret panjang sebuah gerakan yang terus beradaptasi melewati berbagai fase sejarah politik Indonesia. Pada fase pendiriannya di masa Demokrasi Liberal tahun 1955, Sarbumusi lahir sebagai benteng pertahanan ideologis kaum Nahdliyin untuk menahan laju dominasi komunis (SOBSI) di kalangan kelas pekerja. Memasuki era Demokrasi Terpimpin hingga masa transisi politik 1965-1966 (Orde Lama), organisasi ini justru mencapai era keemasannya. Sarbumusi berhasil menghimpun banyak anggota yang menguasai sektor-sektor industri vital nasional, dan bahkan mengambil peran sentral di garis depan bersama Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) dalam menumpas sisa-sisa pengaruh PKI.

Namun, memasuki masa Orde Baru, konstelasi politik berbalik arah dan membawa Sarbumusi pada fase kejatuhan serta kelumpuhan struktural. Rezim militeristik yang mengutamakan stabilitas investasi menerapkan sistem korporatisme eksklusiver, yang memuncak pada kebijakan fusi paksa seluruh serikat buruh independen ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada tahun 1973, dan berlanjut direstrukturisasi menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada tahun 1985. Kebijakan tangan besi ini mencabut kemandirian fungsional Sarbumusi secara absolut, sehingga Nahdlatul Ulama terpaksa merumuskan siasat kultural perlindungan buruh melalui pembentukan Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTK) NU pada tahun 1994 guna menghindari benturan hukum dengan penguasa.

Runtuhnya rezim Orde Baru akibat krisis multidimensional pada tahun 1998 membuka gerbang Masa Reformasi yang menjadi momentum kebangkitan kembali bagi Sarbumusi. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 oleh pemerintah transisi seketika meruntuhkan belenggu serikat buruh tunggal, memfasilitasi Sarbumusi untuk mendeklarasikan kebangkitannya pada 26 Juni 1998 dan secara resmi dipulihkan kedudukannya sebagai Badan Otonom (Banom) NU pada tahun 2004. Dinamika kebangkitan ini terus bereskalasi melintasi beberapa periode kepemimpinan nasional hingga memasuki rentang tahun 2014-2016, yang

bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada fase krusial ini, untuk merespons kerasnya tantangan ketenagakerjaan modern dan integrasi pasar bebas global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Sarbumusi di bawah kepemimpinan H.M. Syaiful Bahri Anshori meratifikasi transformasi wujud kelembagaannya secara paripurna dari sebuah Federasi menjadi Konfederasi yang berdaulat melalui perhelatan Kongres Akbar V pada bulan Mei 2016.

Secara spesifik, penelitian ini memfokuskan kajian tentang Sarbumusi pada periode 1955 hingga 2016. Alasan penulis memfokuskan kajian pada periode tersebut karena tahun 1955 merupakan tahun lahirnya Sarbumusi dalam dunia perburuhan. Kemudian, tahun 2016 diambil oleh penulis sebagai batasan penelitian ini dengan alasan pada tahun tersebut secara sah Sarbumusi bertransformasi dari organisasi yang berbentuk Federasi menjadi Konfederasi.

Secara akademis, masih minim kajian sejarah yang secara komprehensif merekonstruksi dinamika eksistensi Sarbumusi secara utuh melintasi tiga masa pemerintahan. Penelitian ini berupaya menjelaskan rekam jejak Sarbumusi sebagai organisasi buruh Muslim yang berhasil melewati dinamika perjalanan sejarah yang berliku, mulai dari era keemasannya pada masa Orde Lama (1955-1966), upaya bertahan di tengah kelumpuhan struktural akibat kebijakan fusi paksa Orde Baru (1966-1998), hingga proses kebangkitan dan transformasi wujud kelembagaan dari Federasi menjadi Konfederasi pada era Reformasi (1998-2016).

Oleh karena itu, penelitian tentang “Eksistensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dari Masa Orde Lama sampai Masa Reformasi, 1955-2016” ini memiliki urgensi akademik yang tinggi. Secara historis, penelitian ini bertujuan mengisi gap literatur dengan memetakan secara detail tahapan perjalanan eksistensi, adaptasi, dan re-artikulasi peran Sarbumusi dalam merespons struktur kesempatan politik yang terus berubah. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang daya tahan Sarbumusi sebagai Badan Otonom NU dalam kancah perburuhan nasional, yang berkontribusi penting bagi historiografi perburuhan, sejarah politik Indonesia modern, dan studi Islam kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menguraikan lebih jelas dan sistematis rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana sejarah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia pada Masa Orde Lama (1955-1966)?
2. Bagaimana eksistensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)?
3. Bagaimana proses kebangkitan dan eksistensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia pada masa Reformasi (1998-2016)?

C. Tujuan Penelitian

Setelah ditemukannya rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Sarikat Buruh Muslimin Indonesia pada Masa Orde Lama (1955-1966)
2. Untuk mengetahui eksistensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)
3. Untuk menganalisis proses kebangkitan dan eksistensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia pada masa Reformasi (1998-2016)

D. Kajian Pustaka

Sebelum ditulisnya penelitian ini, penulis melakukan observasi ke berbagai sumber dan menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang membahas tentang Sarbumusi. Tetapi, yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang “Eksistensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dari Masa Orde Lama sampai Masa Reformasi, 1955-2016”. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Sarbumusi diantaranya:

1. Buku karya Eka Fitri Rohmawati, Alfanny, dan Sukitman Sudjatmiko (2015) dengan judul “*Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali*”. Penerbit: DPP Konfederasi Sarbumusi, Jakarta Pusat.

Buku ini memiliki cakupan yang membahas sejarah pergerakan Sarbumusi secara luas. Perbedaan buku ini dengan penelitian penulis adalah buku tersebut mengkaji sejarah gerakan Sarbumusi secara tematik dengan tujuan menumbuhkan spirit kebangkitan dan restrukturisasi organisasi, sedangkan penelitian penulis berfokus spesifik pada eksistensi Sarbumusi secara sistematis dan kronologis melewati tiga masa pemerintahan, yaitu dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016). Penelitian penulis secara khusus membedah eksistensi tiap periode kepemimpinan, proses adaptasi organisasi saat penggabungan serikat buruh di masa Orde Baru, hingga puncaknya pada dinamika kebangkitan dan perubahan bentuk Sarbumusi dari federasi menjadi konfederasi pada rentang masa Reformasi.

2. Skripsi karya Alfanny (2001) dengan judul "*Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) 1955-1973*", Universitas Indonesia.

Skripsi ini membahas sejarah lahirnya Sarbumusi pada tahun 1955 beserta dinamikanya sampai tahun 1973. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada cakupan fokus pembahasan dan rentang periode yang dikajinya. Dalam skripsi karya Alfanny, fokus pembahasannya adalah tentang sejarah pergerakan Sarbumusi yang terbatas pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru (1955-1973). Sedangkan penelitian penulis membahas eksistensi Sarbumusi secara lebih komprehensif melintasi tiga zaman, yakni mulai dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016). Selain itu, secara periode, penelitian penulis juga adalah penelitian lanjutan dari skripsi karya Alfanny di atas karena turut melengkapi sejarah kiprah organisasi setelah tahun 1973, termasuk perubahan bentuk Sarbumusi dari federasi menjadi konfederasi.

3. Skripsi karya Amaliya Isa Yulianti (2015) dengan judul "*Sejarah Perjuangan Sarbumusi Terhadap Kaum Buruh di Sidoarjo Tahun 2000-2014 M*", UIN Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi ini merupakan studi kasus lokal yang mencatat perjuangan Sarbumusi dalam skala mikro, yakni terbatas pada dinamika perburuhan di

perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Sidoarjo dari tahun 2000 sampai tahun 2014, dengan fokus utamanya adalah membahas peran dan perjuangan Sarbumusi dalam membela kaum buruh serta menangani berbagai perselisihan hubungan industrial di wilayah Sidoarjo. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada cakupan skala wilayah dan rentang periode yang dikajinya. Dalam skripsi karya Amaliya Isa Yulianti, fokus pembahasannya adalah tentang sejarah perjuangan Sarbumusi yang dibatasi pada tingkat lokal (Sidoarjo) secara spesifik pada periode tahun 2000-2014. Sedangkan penelitian penulis membahas dinamika eksistensi Sarbumusi dalam skala makro-nasional yang jauh lebih luas. Selain itu, secara periode, penelitian penulis mengkaji perjalanan sejarah Sarbumusi yang lebih panjang dan utuh melintasi tiga masa pemerintahan, mulai dari masa Orde Lama (1955-1966), masa Orde Baru (1966-1998), hingga masa Reformasi (1998-2016).

4. Skripsi karya Moh. Agung Santoso (2019) dengan judul *“Gerakan Sarekat Buruh Muslimin Indonesia di Surabaya Tahun 1955-1965”*, Universitas Airlangga.

Skripsi ini berfokus pada dinamika gerakan Sarbumusi di tingkat lokal, yaitu di Kota Surabaya, pada rentang waktu 1955 hingga 1965. Fokus utamanya adalah melihat aktivitas Sarbumusi yang berkaitan dengan politik, yakni posisinya sebagai sayap politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendorong popularitas partai untuk menghadapi Pemilu 1955. Selain itu, skripsi ini mencatat perkembangan pesat gerakan serikat ini yang termotivasi oleh persaingannya melawan dominasi SOBSI, serta memperlihatkan eksistensi Sarbumusi pasca peristiwa 1965 yang semakin kuat terkait dengan loyalitas NU terhadap negara. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup wilayah dan rentang periode waktu yang dikajinya. Dalam skripsi karya Moh. Agung Santoso, fokus pembahasannya sangat spesifik pada pergerakan politik di tingkat lokal (Surabaya) dan hanya terbatas pada periode masa Orde Lama (1955-1965). Sedangkan penelitian penulis mengambil ruang lingkup yang lebih luas secara makro-nasional untuk mengkaji eksistensi Sarbumusi secara berkelanjutan

melintasi tiga masa pemerintahan, yakni dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016).

5. Skripsi karya Sugianto (2019) dengan judul *“Kebijakan Penerapan Upah Minimum Kabupaten Bondowoso Perspektif Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Bondowoso Tahun 2019”*, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Skripsi ini merupakan penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang memotret peran Sarbumusi di tingkat lokal, yakni di Kabupaten Bondowoso. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan pemerintah daerah mengenai penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Bondowoso pada tahun 2019 serta peran aplikatif pengawalan organisasi Sarbumusi setempat terhadap kebijakan tersebut. Skripsi ini lebih bersifat sosiologis-praktis untuk melihat sejauh mana realita kebijakan upah sesuai dengan standar kesejahteraan buruh. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan studi, cakupan wilayah, dan rentang periode yang dikajinya. Dalam skripsi karya Sugianto, pendekatan yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah dengan fokus pada isu spesifik mengenai pengupahan di tingkat daerah (Bondowoso) dan dibatasi pada satu tahun tertentu (2019). Sedangkan penelitian penulis adalah sebuah kajian sejarah (historiografi) berskala makro-nasional yang menganalisis dinamika perjalanan organisasi secara utuh. Penelitian penulis berfokus pada eksistensi Sarbumusi secara berkelanjutan yang melintasi tiga masa pemerintahan, yakni mulai dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016).

6. Skripsi karya Salma Milatun Aliyah (2023) dengan judul *“Pola Gerakan Politik Serikat Buruh Muslimin Indonesia dalam Meperjuangkan Hak Buruh (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Sarbumusi Kabupaten Bojonegoro)”*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi ini merupakan penelitian dalam bidang Ilmu Politik yang berfokus pada pola gerakan politik Sarbumusi di tingkat cabang, khususnya DPC Kabupaten Bojonegoro, dalam upayanya memperjuangkan hak-hak buruh. Pembahasan di dalamnya membedah strategi, taktik pergerakan, serta dinamika protes kolektif

yang digunakan oleh Sarbumusi setempat. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan disiplin ilmu, skala wilayah, dan fokus rentang kajiannya. Skripsi karya Salma Milatun Aliyah menggunakan pendekatan Ilmu Politik yang menitikberatkan pada analisis taktik gerakan sosial atau strategi politik praktis secara spesifik di tingkat lokal (Bojonegoro). Sedangkan penelitian penulis adalah sebuah kajian sejarah (historiografi) berskala makro-nasional yang tidak sekadar membedah taktik politiknya, melainkan merekonstruksi sejarah dinamika organisasi secara utuh. Penelitian penulis mengkaji perjalanan eksistensi Sarbumusi yang melintasi tiga masa pemerintahan, yakni mulai dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016).

7. Skripsi karya Chesty Prasetya Revani (2024) dengan judul *“Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 09/G/2013/PHI.GS Tentang Perselisihan Antar Serikat Pekerja GB-LP MMRT Sarbumusi PT. Miwon Indonesia Melawan PUK SP RTMM – SPSI PT. Miwon Indonesia”*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan penelitian dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada kajian putusan pengadilan mengenai perselisihan antar-serikat pekerja di PT. Miwon Indonesia. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada disiplin ilmu, pendekatan kajian, dan skala fokus utamanya. Skripsi karya Chesty Prasetya Revani menggunakan pendekatan ilmu hukum untuk membedah sebuah putusan pengadilan secara spesifik mengenai konflik industrial antara Sarbumusi dan SPSI di satu perusahaan. Sementara itu, penelitian penulis adalah sebuah kajian sejarah (historiografi) yang mengambil ruang lingkup makro-nasional. Penelitian penulis berfokus merekonstruksi eksistensi dan perjalanan panjang organisasi Sarbumusi secara berkelanjutan, melintasi Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016).

8. Artikel karya Af Sigit Rochadi (2016) dengan judul *“Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia”*.

Artikel ini merupakan penelitian sosiologis yang menggunakan analisis komparatif untuk membedah dinamika dua organisasi pekerja Muslim di Indonesia, yakni Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Perbedaan antara penelitian artikel ini dengan penelitian penulis, yaitu dalam artikel karya Af Sigit Rochadi, pendekatannya menggunakan sosiologi yang membandingkan dua entitas organisasi buruh (Sarbumusi dan PPMI) secara bersamaan dengan menyoroti dinamika pasca Orde Baru. Sedangkan penelitian penulis adalah sebuah kajian sejarah (historiografi) yang berfokus tunggal secara spesifik pada eksistensi Sarbumusi. Penelitian penulis juga merekonstruksi perjalanan historis organisasi tersebut secara lebih utuh dan berkelanjutan melintasi tiga era pemerintahan, yakni mulai dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016).

9. Artikel karya Yeski Putri Utami, dkk. (2024) dengan judul *“Pelatihan Teknik Berunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Serikat Pekerja dibawah Naungan Sarbumusi”*.

Artikel ini memiliki fokus yang bersifat praktis dan tematik yang didasarkan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota serikat pekerja di bawah naungan Sarbumusi di Kabupaten Karawang dalam menghadapi kendala penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perbedaan antara penelitian artikel ini dengan penelitian penulis yaitu, dalam artikel karya Yeski Putri Utami dkk. penelitian berorientasi pada aspek teknis-operasional (pelatihan) untuk merespons masalah ketenagakerjaan secara praktis di satu wilayah spesifik (Karawang). Sedangkan penelitian penulis adalah sebuah kajian sejarah (historiografi) berskala makro-nasional yang berfokus pada rekonstruksi dinamika perjalanan organisasi Sarbumusi secara utuh. Penelitian penulis mengkaji eksistensi Sarbumusi secara berkelanjutan yang melintasi tiga era, yakni mulai dari Masa Orde Lama (1955-1966), Masa Orde Baru (1966-1998), hingga Masa Reformasi (1998-2016).

Secara keseluruhan, yang membedakan penelitian ini dengan berbagai penelitian terdahulu terletak pada pendekatan keilmuan, skala cakupan wilayah, serta rentang kronologi yang dikaji. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih dominan menggunakan pendekatan non-sejarah, seperti ilmu politik, sosiologi, hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, hingga praktikum, serta membatasi fokus kajiannya pada studi kasus berskala mikro-lokal di daerah tertentu (seperti Sidoarjo, Surabaya, Bondowoso, Bojonegoro, Gresik, dan Karawang) dengan periode waktu yang sangat sempit atau sekadar pembahasan tematik. Sebaliknya, penelitian penulis memosisikan diri sebagai sebuah kajian historiografi berskala makro-nasional yang secara spesifik dan komprehensif merekonstruksi perjalanan panjang Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) secara berkesinambungan. Kajian ini secara utuh menelusuri dinamika eksistensi organisasi tersebut melintasi tiga masa pemerintahan berturut-turut, mulai dari era keemasannya pada masa Orde Lama (1955-1966), strategi adaptasi di tengah represi fusi serikat buruh pada masa Orde Baru (1966-1998), hingga puncak kebangkitan dan transformasi wujud kelembagaannya dari federasi menjadi konfederasi pada masa Reformasi (1998-2016).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian sejarah, sesuai dengan kerangka yang diajukan oleh Kuntowijoyo. Proses pelaksanaannya mencakup tahapan-tahapan yang terstruktur, diawali dengan heuristik atau pengumpulan sumber, dilanjutkan dengan kritik sumber yang meliputi kritik intern dan ekstern, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran ulang terhadap data yang terkumpul, dan diakhiri dengan historiografi atau penyajian dalam bentuk tulisan.³³

1. Heuristik

Heuristik (*heuristics*) merupakan sebuah proses pencarian sumber-sumber yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, materi sejarah, atau evidensi

³³ Kuntowijoyo, *"Pengantar Ilmu Sejarah"*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 64.

(bukti) sejarah yang diperlukan. Tahap heuristik ini sering kali menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Dalam melaksanakan tahap ini, sangat penting bagi kita untuk terlebih dahulu memanfaatkan kemampuan berpikir kita untuk menyusun strategi dan mengidentifikasi di mana serta bagaimana bahan-bahan tersebut dapat diperoleh, siapa saja atau instansi apa yang dapat dihubungi, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi jika ke tempat-tempat lain, ataupun keperluan untuk fotokopi, informan, dll.³⁴

Sumber-sumber dapat dikelompokkan menjadi primer dan sekunder berdasarkan urutan penyampaian. Sebuah sumber disebut sumber primer dalam konteks sejarah apabila disampaikan oleh saksi mata kejadian, seperti yang terlihat pada catatan rapat, daftar keanggotaan organisasi, atau arsip-arsip laporan yang disusun oleh seorang asisten residen pada abad ke-19. Para sejarawan sangat dianjurkan untuk berupaya mendapatkan jenis sumber primer ini. Menariknya, terdapat perbedaan istilah antara disiplin ilmu. Yang disebut sejarawan sebagai sumber primer, misalnya arsip-arsip kelurahan, sering kali dianggap sumber sekunder dalam penelitian ilmu sosial. Ini disebabkan karena yang dikategorikan sebagai sumber primer dalam ilmu sosial adalah wawancara langsung dengan responden, yang berimplikasi bahwa sebagian besar buku hanya memuat sumber sekunder. Meskipun demikian, sejarawan tidak akan mempermasalahkan klasifikasi sumber (primer atau sekunder) jika sumber tersebut merupakan satu-satunya sumber yang tersedia.³⁵

a. Sumber Primer

Sumber primer (*primary sources*) adalah sumber yang sezaman (kontemporer) dengan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, Naskah Proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik pada malam menjelang Proklamasi adalah autentik (orisinal), begitu pula hasil notulen rapat BPUPKI pada bulan Mei, Juni, dan Juli 1945 merupakan sumber-sumber pertama (*primary sources*).³⁶

³⁴ Helius Sjamsuddin, *“Metodologi Sejarah”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 55.

³⁵ Kuntowijoyo, *“Pengantar Ilmu Sejarah”*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 75.

³⁶ Helius Sjamsuddin, *“Metodologi Sejarah”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 68-69.

Sumber pertama atau sumber primer dapat dibagi dua, yaitu (1) sumber cetakan (*published*). Sumber cetakan ini ada yang dipublikasikan oleh Pemerintah, ada pula oleh non-Pemerintah (swasta atau individu-individu). Kemudian, (2) tidak dicetak (*unpublished*) atau sumber manuskrip. Sumber manuskrip ini dibedakan juga antara yang dihasilkan oleh Pemerintah dan yang dihasilkan oleh non-Pemerintah (organisasi swasta atau individu). Perbedaan antara Pemerintah dan non-Pemerintah menyangkut pada ada tidaknya kontrol terhadap substansi sumber atau dokumen.³⁷

Dalam penelitian ini, sumber primer yang didapatkan penulis diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Tertulis

a) Arsip

- (1) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Sarbumusi, tanggal 10 Juli 1998. DPP Sarbumusi.
- (2) Arsip NU Nomor 337 tahun 1956, "*Surat dari PW Sarekat Buruh Muslimin Indonesia kepada Perwakilan PB Sarbumusi mengenai saran untuk memindahkan kedudukan PB ke Jakarta*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Arsip NU Nomor 420 tahun 1956, "*Surat dari PP Sarbumusi kepada PW Sarbumusi Jawa Timur mengenai permohonan untuk aktif dalam memberi sumbangan sehingga terjalin kegotong royongan antara pimpinan badan-badan keluarga NU yang harmonis*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (4) Arsip NU Nomor 1628 tahun 1956, "*Surat-surat mengenai pembentukan dan susunan kepengurusan PW Sarbumusi Sumatra Utara*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

³⁷ Helius Sjamsuddin, "*Metodologi Sejarah*", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 70-71.

- (5) Arsip NU Nomor 1629 tahun 1955, "*Surat-surat mengenai Konferensi Wilayah Sarbumusi Jawa Timur I*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (6) Arsip NU Nomor 1631 tahun 1956, "*Surat Keputusan PW Sarbumusi Jawa Timur tentang penugasan kepada Konsul NU Jawa Timur dalam memperjuangkan kedudukan Sarbumusi pada NU*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (7) Arsip NU Nomor 1632 tahun 1956, "*Surat-surat mengenai permohonan daftar, tanda anggota, dan Anggaran Dasar Sarbumusi*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (8) Arsip NU Nomor 1634 tahun 1956, "*Surat-surat mengenai laporan situasi intern PW Sarbumusi Jawa Timur*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (9) Arsip NU Nomor 1639 tahun 1956, "*Surat dari Perwakilan PP Sarbumusi kepada PW Sarbumusi Jawa Timur mengenai permohonan daftar PC Sarbumusi di Jawa Timur*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (10) Arsip NU Nomor 2892 tahun 1956, "*Instruksi PB Sarbumusi tentang Memelihara Hubungan Baik dengan Organisasi Buruh*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (11) Arsip NU Nomor 2940 tahun 1973, "*Surat-surat mengenai pembentukan Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) Jawa Tengah*", dalam bentuk arsip tekstual. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (12) Deklarasi Kebangkitan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), tanggal 26 Juni 1998. DPP Sarbumusi.
- (13) Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926. (Semarang: Sumber Barokah Semarang, 1985).
- (14) Hasil-Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28. (Jakarta: PBNU, 1989).

- (15) Hasil Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama. (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 1996).
- (16) Hasil-Hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama. (Jakarta: Sekjen PBNU, 2000).
- (17) Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama. (Jakarta: Sekjen PBNU, 2005).
- (18) Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama. (Jakarta: Sekjen PBNU, 2010).
- (19) Hasil Sidang Komisi: Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Sarbumusi, tanggal 11 Mei 1999. DPP Sarbumusi.
- (20) Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional Pertama LPTK NU di Bandung tanggal 4-6 Desember 1996. PP LPTKNU.
- (21) Naskah Deklarasi Pembentukan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, tanggal 25 Mei 2014. DPP Konfederasi Sarbumusi.
- (22) Notulen Verslag Sementara Mu'tamar NU Ke-20 di Surabaya. PBNU.
- (23) Peraturan Organisasi Tentang Sistem Pungutan dan Distribusi Iuran Anggota Sarikat Buruh Muslimin Indonesia. DPP Sarbumusi.
- (24) Program Umum Kebangkitan dan Berfungsinya Kembali Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Masa Bakti 1999-2004. DPP Sarbumusi.
- (25) Surat Keputusan Nomor: SK/Kep.001/DPP.KSBMI/VIII/2014 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Periode 2014-2019. DPP Konfederasi Sarbumusi.
- (26) Surat Keputusan Nomor: Kep. 02/Rakernas/SARBUMUSI/V/1999 Tentang Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Masa Bakti 1999-2004. DPP Sarbumusi.
- (27) Surat Keputusan Nomor: KEP. 03/Rakernas/SARBUMUSI/V/1999 Tentang Program Umum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Masa Bakti 1999-2004. DPP Sarbumusi.

- (28) Surat Keputusan NO. KEP. 04/PO/DPP/XI/2000 Tentang Sistem Pemungutan Dan Distribusi Iuran Anggota Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI). DPP Sarbumusi.

b) Buku

- (1) Biro Penerangan DPP Sarbumusi, *“nasib kaum buruh ada ditangan kaum buruh sendiri”*, (Jakarta: Biro Penerangan DPP Sarbumusi, 1970).
- (2) DPP Sarbumusi, *“50 Tahun Sarbumusi Berkhidmah kepada Kaum Buruh”*, (Jakarta: DPP Sarbumusi, 2005).
- (3) Eka Fitri Rohmawati, Alfanny, dan Sukitman Sudjatmiko, *“Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali”*, (Jakarta Pusat: DPP Konfederasi Sarbumusi, 2015).

c) Surat Kabar

- (1) *Duta Masyarakat*, edisi 4 Juli 1959.
- (2) *Duta Masyarakat*, edisi 26 Desember 1959.
- (3) *Duta Masyarakat*, edisi 13 Agustus 1963.
- (4) *Duta Masyarakat*, edisi 19 September 1963.
- (5) *Duta Masyarakat*, edisi 2 Januari 1965.
- (6) *Duta Masyarakat*, edisi 22 Februari 1965.
- (7) *Duta Masyarakat*, edisi 2 Maret 1965.
- (8) *Duta Masyarakat*, edisi 3 Maret 1965.
- (9) *Duta Masyarakat*, edisi 4 Maret 1965.
- (10) *Duta Masyarakat*, edisi 5 Maret 1965.
- (11) *Duta Masyarakat*, edisi 7 Maret 1965.

2) Sumber Visual

a) Fotografis

- (1) Foto Audiensi Pengurus Baru DPP Sarbumusi Periode 2010-2015 dengan Menteri Tenaga Kerja, H. A. Muhaimin Iskandar. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (2) Foto Balai Latihan Kerja (BLK) DPP Sarbumusi di Jakarta Timur. Dokumentasi DPP Sarbumusi.

- (3) Foto Delegasi DPP Sarbumusi (H. Djunaidi Ali) melakukan Studi Banding ke JIL di Tokyo. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (4) Foto DPP Sarbumusi mengadakan Dialog Buruh dengan Parpol Peserta Pemilu 2004. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (5) Foto Pelantikan Pengurus Baru DPP Sarbumusi Periode 2010-2015. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (6) Foto Pembacaan Deklarasi Kebangkitan Sarbumusi oleh Sutanto Martoprasono pada tanggal 26 Juni 1998. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (7) Foto Pembukaan Sidang Pleno Paripurna Sarbumusi tanggal 11 Oktober 2004. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (8) Foto Pengurus Baru DPP Sarbumusi Periode 2010-2015 Berfoto bersama Ketua Umum PBNU setelah Audiensi. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (9) Foto Peresmian Kantor DPP Sarbumusi, yang berlokasi di Jl. Raden Saleh I No. 7A Jakarta pada tahun 2012. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (10) Foto Peserta Kongres Sarbumusi 2010 bersama Menteri Tenaga Kerja, H. A. Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum ke-4 Sarbumusi, H. Djunaidi Ali. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (11) Foto Rapat Kerja DPP Konfederasi Sarbumusi di Lembang, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari - 1 Maret 2015. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (12) Foto Rakernas Sarbumusi di Griya Sabha DPR-RI, Kopo, Bogor pada tanggal 10-11 Mei 1999. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (13) Foto Silaturahmi Nasional Sarbumusi pada tanggal 26 Juni 1998. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (14) Foto Suasana Kongres Akbar IV Sarbumusi di Hotel Ciloto Indah, Puncak-Cianjur pada tanggal 1-3 Agustus 2010. Dokumentasi DPP Sarbumusi.
- (15) Foto Ta'aruf Pengurus DPP Sarbumusi tanggal 31 Desember 2003 di Malang, Jawa Timur. Dokumentasi DPP Sarbumusi.

(16) Foto Turnamen Futsal Trofi Ketua Umum PBNU dan Menakertrans.
Dokumentasi DPP Sarbumusi.

b) Grafis

(1) Lambang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), didapatkan dari <https://sarbumusi.org/>, pada tanggal 15 November 2025.

3) Sumber Lisan

a) Wawancara

(1) Alfanny, berusia 48 tahun. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Sarbumusi Periode 2004-2010.

(2) Irham Ali Saifuddin, berusia 49 tahun. Beliau adalah Anggota Dewan Pengawas Nasional DPP Sarbumusi Periode 2010-2015, dan menjadi Presiden Konfederasi Sarbumusi Periode 2022-2027.

(3) Soeharjono, berusia 57 tahun. Beliau adalah Anggota Dewan Pengawas Nasional DPP Sarbumusi Periode 2010-2015, dan menjadi Wakil Presiden Bidang Luar Negeri Periode 2016-2021.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder (*secondary sources*) adalah sumber yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama. Kemudian, sumber kedua ini pada gilirannya dikutip lagi oleh penulis berikutnya sehingga hasilnya menjadi sumber ketiga dan seterusnya.³⁸ Adapun sumber sekunder yang didapatkan penulis untuk penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Tertulis

a) Buku

(1) Alex Supartono, "*Marsinah: Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan Indonesia*", (Jakarta: YLBHI, 1999).

(2) *Buku Kenang2an Mu'tamar ke: XXII Partai Nahdlatul 'Ulama*, (Jakarta: Jamunu, 1962).

(3) Kevin O'Rourke, "*Reformasi: The struggle for power in post-Soeharto Indonesia*", (Maryborough: Allen & Unwin, 2002).

³⁸ Helius Sjamsuddin, "*Metodologi Sejarah*", (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 68.

- (4) Mohtar Mas'ood, "*Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*", (Jakarta: LP3ES, 1989).
 - (5) Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, "*Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*", (London: RoutledgeCurzon, 2004).
 - (6) Soegiri DS dan Edi Cahyono, "*Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*", (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).
 - (7) Suhari Ete, "*Buruh Indonesia Perdjoengan Dari Masa ke Masa*", (Jakarta: Triwarna Media Publishing, 2016).
 - (8) Vedi R. Hadiz, "*Buruh dan Negara di Indonesia*", (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024).
- b) Karya Ilmiah
- (1) Af Sigit Rochadi, "*Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia*", dalam Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V Vol. 1 (Padang: 2016), hlm. 1-18.
 - (2) Alfanny, "*Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) 1955-1973*", Skripsi, (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2001).
 - (3) Amaliya Isa Yulianti, "*Sejarah Perjuangan Sarbumusi Terhadap Kaum Buruh di Sidoarjo Tahun 2000–2014 M*", Skripsi, (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
 - (4) Safari Daud, "*Antara Biografi dan Historiografi: (Studi 36 Buku Biografi di Indonesia)*", Analisis Vol. XIII No. 1, (2024), hlm. 243-270.
 - (5) Vedi R. Hadiz, "*Reformasi Total? Labor after Suharto*", Jurnal Indonesia No. 66, (1998), hlm. 109-124.
- c) Majalah
- (1) Prisma, "*Ekonomi Politik Ketenagakerjaan*", Edisi No. 7, (Jakarta: LP3ES, 1996).
 - (2) Prisma, "*Gemuruhnya Buruh: Redistribusi Kekuasaan dan Bantuan Hukum*", Edisi No. 5, (Jakarta: LP3ES, 1981).

d) Tulisan dalam Internet

- (1) A. Khoirul Anam, “Gelar Kongres IV, Sarbumusi Ingin Kembalikan Kejayaan”, *nu.or.id*, 2010, <https://nu.or.id/warta/gelar-kongres-iv-sarbumusi-ingin-kembalikan-kejayaan-IKcwi> (diakses pada 26 Juli 2026 Pukul 09.13 WIB).
- (2) Abdullah Alawi, “PBNU Minta Sarbumusi Perjuangkan Martabat Buruh”, *nu.or.id*, 2016, <https://nu.or.id/nasional/pbnu-minta-sarbumusi-perjuangkan-martabat-buruh-PIIdUB> (diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 07.15 WIB).
- (3) Alfanny, “Sarbumusi, Melindungi Warga NU di era Modernisasi-Industrialisasi”, *nu.or.id*, 2009, <https://nu.or.id/opini/sarbumusi-melindungi-warga-nu-di-era-modernisasi-industrialisasi-GJuHE> (diakses pada 26 Juli 2026 Pukul 08.43 WIB).
- (4) Alhafiz Kurniawan, “Sarbumusi Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Perburuhan”, *nu.or.id*, 2014, <https://nu.or.id/nasional/sarbumusi-desak-pemerintah-perbaiki-sistem-perburuhan-VUrnW> (diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 06.08 WIB).
- (5) Alhafiz Kurniawan, “Sarbumusi Desak Penghapusan UU Pasal Buruh Kontrak”, *nu.or.id*, 2012, <https://www.nu.or.id/nasional/sarbumusi-desak-penghapusan-uu-pasal-buruh-kontrak-4ePgI> (diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 04.23 WIB).
- (6) Gatot Arifianto, “Pernyataan Sikap DPP K-Sarbumusi terhadap Persoalan Buruh”, *nu.or.id*, 2015, <https://www.nu.or.id/nasional/pernyataan-sikap-dpp-k-sarbumusi-terhadap-persoalan-buruh-61tlA> (diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 06.28 WIB).
- (7) Mukafi Niam, “Sarbumusi Ikuti Sidang ILO di Jenewa”, *nu.or.id*, 2008, <https://www.nu.or.id/warta/sarbumusi-ikuti-sidang-ilo-di-jenewa-wa-wnKxp> (diakses pada 26 Juli 2026 Pukul 08.16 WIB).
- (8) Mukafi Niam, “Sarbumusi Peringati Mayday dengan Cara Non Kekerasan”, *nu.or.id*, 2011, <https://www.nu.or.id/warta/sarbumusi->

- peringati-mayday-dengan-cara-non-kekerasan-Z16Tf (diakses pada 26 Juli 2026 Pukul 22.27 WIB).
- (9) Mukafi Niam, “Sarbumusi Resmikan Kantor Baru”, *nu.or.id*, 2012, <https://nu.or.id/warta/sarbumusi-resmikan-kantor-baru-ST2oL> (diakses pada 27 Juli 2026 Pukul 00.48 WIB).
- (10) Puji Utomo, “Organisasi Buruh Tolak Kenaikan BBM”, *nu.or.id*, 2005, <https://nu.or.id/warta/organisasi-buruh-tolak-kenaikan-bbm-zzRwZ> (diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 17.25 WIB).
- (11) Puji Utomo, “PWNU dan PCNU Diharap Bantu Pembentukan Sarbumusi”, *nu.or.id*, 2005, <https://nu.or.id/warta/pwnu-dan-pcnu-diharap-bantu-pembentukan-sarbumusi-gsR9G> (diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 15.57 WIB).
- (12) Puji Utomo, “Sarbumusi Minta Dijadikan Badan Otonom”, *nu.or.id*, 2004, <https://nu.or.id/warta/sarbumusi-minta-dijadikan-badan-otonom-A4fo6> (diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 09.43 WIB).
- (13) Puji Utomo, “Sarbumusi Tak Setuju UMR Baru Rp.711.000”, *nu.or.id*, 2004, <https://www.nu.or.id/warta/sarbumusi-tak-setuju-umr-baru-rp711000-N9rz3> (diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 17.33 WIB).
- (14) Puji Utomo, “Sarbumusi Tolak Sistem Kontrak Buruh”, *nu.or.id*, 2004, <https://www.nu.or.id/warta/sarbumusi-tolak-sistem-kontrak-buruh-R3dBu> (diakses pada 25 Juli 2026 Pukul 16.15 WIB).
- (15) Syaifullah Amin, “Sarbumusi Desak Pemerintah Hapus Outsourcing”, *nu.or.id*, 2011, <https://islam.nu.or.id/warta/sarbumusi-desak-pemerintah-hapus-outsourcing-eNj4d> (diakses pada 26 Juli 2026 Pukul 23.37 WIB).

2. Kritik

Dalam metodologi penelitian sejarah, tahapan kedua setelah heuristik adalah kritik sumber, baik terhadap bahan material sumber maupun substansi atau isi sumber itu sendiri. Tujuan utama dari tahap kritik ini adalah memastikan bahwa setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber yang relevan untuk penelitiannya,

sejarawan tidak akan langsung menerima segala sesuatu yang tercantum atau tertulis pada sumber-sumber tersebut. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh sejarawan adalah menyaring sumber-sumber itu secara kritis agar dapat terjaring fakta yang akan dipilih dan digunakan dalam penelitian.³⁹

Kritik sumber umumnya dilakukan pada sumber-sumber utama atau yang pertama. Proses kritik ini mencakup verifikasi sumber, yang merupakan pengujian untuk memastikan kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber tersebut. Dalam metode sejarah, proses ini secara spesifik dilakukan melalui dua pendekatan, yang dikenal dengan kritik ekstern dan kritik intern.⁴⁰

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan metode verifikasi atau pengujian yang difokuskan pada aspek-aspek luar dari suatu sumber sejarah. Sebelum seorang sejarawan dapat menggunakan semua sumber yang telah dikumpulkan untuk merekonstruksi masa lalu, sumber-sumber tersebut wajib menjalani pemeriksaan yang ketat. Fungsi utama dari kritik ekstern ini adalah untuk memeriksa sumber sejarah dan berupaya sekuat tenaga memastikan keaslian (otentisitas) sumber serta memastikan bahwa sumber tersebut belum dimodifikasi (integritas). Kritik ekstern harus membuktikan fakta mengenai sumber tersebut, yakni bahwa (1) sumber itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau dibuat pada waktu yang ini (*authenticity*), dan (2) sumber yang telah diberikan tersebut tetap utuh tanpa adanya perubahan (*uncorrupted*), termasuk tanpa tambahan-tambahan atau penghilangan-penghilangan yang substansial (*integrity*).⁴¹

Proses verifikasi ini berfokus pada analisis terhadap unsur-unsur luar dari sumber yang diperoleh, sehingga rekonstruksi peristiwa masa lalu memiliki tingkat kevalidan dan keterpercayaan akademik yang tinggi. Dalam melaksanakan kritik ekstern, peneliti memperhatikan tiga kriteria utama.

³⁹ Helius Sjamsuddin, *“Metodologi Sejarah”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 83.

⁴⁰ Helius Sjamsuddin, *“Metodologi Sejarah”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 84.

⁴¹ Helius Sjamsuddin, *“Metodologi Sejarah”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 84-85.

- 1) Peneliti menelusuri waktu dan asal-usul pembuatan sumber dengan mengidentifikasi pembuat, instansi penerbit, tempat perolehan, serta konteks historis saat sumber tersebut diproduksi.
- 2) Peneliti melakukan verifikasi terhadap bahan fisik atau material sumber, yang mencakup analisis kondisi fisik dokumen, keabsahan tanda tangan, stempel resmi, format redaksional, hingga elemen visual pada foto dokumentasi.
- 3) Khusus untuk sumber lisan dan kelembagaan, peneliti melakukan verifikasi terhadap identitas, posisi jabatan, serta tingkat keterlibatan narasumber dalam peristiwa sejarah, yang diimbangi dengan pemeriksaan kelengkapan administratif seperti kesesuaian nomor dokumen, kop surat, tanggal penetapan, dan kedudukannya di dalam struktur organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menerapkan tahapan kritik ekstern tersebut terhadap beberapa sampel sumber berikut:

a) Arsip

Pada kategori sumber tertulis jenis arsip, penulis melakukan tahapan kritik ekstern terhadap dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Sarbumusi bertanggal 10 Juli 1998 yang diterbitkan oleh DPP Sarbumusi. Peneliti menilai bahwa dokumen konstitusi internal ini otentik karena merupakan naskah resmi yang dikeluarkan langsung oleh pengurus pusat Sarbumusi pada momentum yang bersesuaian dengan fase awal kebangkitan kembali organisasi di era Reformasi. Pengujian fisik dan administratif mengonfirmasi bahwa dokumen ini dilengkapi dengan tanda tangan pengurus serta atribut kelembagaan yang sah. Dari segi bentuk dan substansi, naskah AD/ART ini memperlihatkan pembaruan struktur serta penyesuaian pasal-pasal organisasi dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang menandakan adanya adaptasi hukum atas perubahan regulasi perburuhan nasional pasca-Orde Baru. Kondisi fisik arsip ini tersimpan rapi dan terjaga dengan baik di dalam sistem pengarsipan internal, sehingga integritas data di dalamnya utuh tanpa mengalami modifikasi sepihak. Berdasarkan kriteria fisik, historis, dan administratif tersebut, dokumen ini dinyatakan otentik dan sangat layak dipergunakan sebagai sampel sumber tertulis.

b) Wawancara

Pada kategori sumber lisan, sampel kritik ekstern diterapkan pada kesaksian Alfanny yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Sarbumusi Periode 2004-2010. Peneliti memverifikasi identitas dan kredibilitas narasumber melalui rekam jejak kepengurusan dan jabatan strategis yang pernah diembannya secara formal di tingkat pusat. Peneliti menilai bahwa narasumber berada dalam kondisi fisik yang sehat serta memiliki daya ingat yang sangat kuat dan presisi dalam merekonstruksi dinamika pergerakan organisasi pada masanya. Kesaksian yang disampaikan bersifat otentik karena bersumber dari pelaku sejarah primer yang terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa penting transisi kelembagaan Sarbumusi. Keutuhan data lisan ini terjamin karena proses perekaman dan penyusunan transkrip wawancara dilakukan secara objektif tanpa adanya rekayasa redaksional, penambahan, maupun pengurangan substansi oleh pihak lain. Dengan terujinya identitas, kapasitas historis, dan integritas rekaman kesaksian tersebut, maka sumber lisan ini dinyatakan valid dan layak dipergunakan dalam penelitian.

b. Kritik Intern

Berbeda dengan kritik ekstern, kritik intern adalah metode verifikasi atau pengujian yang lebih menekankan pada aspek dalam atau isi dari suatu sumber sejarah. Pada tahap ini, setelah fakta dari sumber dipastikan melalui kritik ekstern, selanjutnya seorang sejarawan mengadakan penilaian terhadap sumber tersebut. Ia harus memutuskan apakah sumber tersebut dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak.⁴²

Dalam pelaksanaan tahapan ini, perlu dilakukan tiga prosedur utama untuk menentukan tingkat keterpercayaan suatu sumber, pertama melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber, kedua melakukan komparasi atau membandingkan antar sumber, dan ketiga memastikan adanya koraborasi atau saling pendukungan antar sumber. Sebagai sampel penerapan kritik intern ini, penulis menggunakan perpaduan antara sumber lisan dan sumber tertulis, yaitu wawancara dengan Alfanny selaku Sekretaris Jenderal Sarbumusi Periode 2004-2010, serta buku

⁴² Helius Sjamsuddin, *"Metodologi Sejarah"*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 91.

berjudul “Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali” karya Eka Fitri Rohmawati, Alfanny, dan Sukitman Sudjatmiko.

1) Melakukan Penilaian Intrinsik

a) Melakukan penilaian terhadap sifat sumber

Dari segi sifat sumber, data primer lisan yang dihimpun melalui wawancara Alfanny dinilai memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan data tertulis berupa buku “Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali” karya Eka Fitri Rohmawati, Alfanny, dan Sukitman Sudjatmiko. Kedua sumber tersebut berperan sebagai instrumen yang saling melengkapi, rincian sejarah lisan yang direkonstruksi dari wawancara menjadi pelengkap yang utuh bagi narasi kebangkitan organisasi yang tertuang di dalam buku.

b) Menyoroti pengarang atau narasumber

Dalam tahapan ini, penulis mengamati secara cermat kredibilitas Alfanny yang menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal Sarbumusi pada periode krusial transisi (2004-2010). Posisi sentral ini menempatkannya sebagai aktor utama yang sangat kredibel, sehingga kesaksiannya memiliki bobot sejarah yang tinggi dan ia diyakini mampu menyampaikan kebenaran peristiwa secara objektif tanpa menutup-nutupinya. Kredibilitas ini semakin diperkuat dengan posisinya sebagai salah satu penulis buku “Sejarah Gerakan Sarbumusi”, yang memastikan bahwa informasi di dalam buku tersebut sangat terpercaya karena memuat data primer mengenai dinamika transisi bentuk organisasi yang tidak dapat ditemukan pada literatur atau media luar.

2) Komparasi Sumber

Komparasi sumber dilakukan dengan membandingkan setiap isi atau substansi pembahasan dari sumber-sumber yang telah didapatkan oleh penulis. Dalam tahapan komparasi ini, penulis melakukan verifikasi silang dengan membandingkan detail kesaksian lisan Alfanny mengenai kebijakan harian Sarbumusi dengan muatan tekstual yang tertuang di dalam buku “Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali”. Melalui

proses perbandingan tersebut, penulis menemukan bahwa penuturan sang narasumber mengenai masa krusial transisi Sarbumusi selaras dan berkesinambungan dengan upaya membangkitkan memori kolektif organisasi yang dicatat dalam buku. Kesimpulan dari komparasi ini menegaskan bahwa kedua sumber tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, dan hal tersebut sangat sesuai dengan keperluan penelitian yang penulis lakukan untuk menganalisis eksistensi serta dinamika kelembagaan Sarbumusi.

3) Korborasi Sumber

Korborasi sumber dilaksanakan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah disarikan dari persilangan masing-masing sumber. Dalam penelitian ini, penulis mengkorborasikan detail sejarah lisan dari wawancara Alfanny dengan narasi historis dari buku yang juga melibatkan pemikirannya sebagai tokoh internal organisasi. Proses saling pendukungan dari kedua sumber ini berhasil merekonstruksi narasi sejarah yang utuh mengenai bagaimana Sarbumusi melakukan konsolidasi, membangkitkan kejayaannya kembali, serta merespons berbagai transisi kebijakan perburuhan. Dari hasil proses korborasi ini, penulis telah memperoleh kepastian fakta sejarah yang diperlukan dalam menguraikan fokus penelitian secara tajam. Berdasarkan keseluruhan hasil kritik internal tersebut, penulis memastikan bahwa narasumber maupun pengarang literatur yang digunakan sangat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat informasi tersebut bersumber langsung dari pelaku sejarah sekaligus saksi mata yang terlibat aktif di dalam dinamika kelembagaan Sarbumusi.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sering kali dianggap sebagai sumber utama subjektivitas, pandangan ini ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya benar. Hal itu dianggap benar karena tanpa adanya penafsiran dari sejarawan, data yang ada tidak akan dapat menjelaskan maknanya. Sejarawan yang berpegang teguh pada kejujuran akan selalu mencantumkan data yang digunakan dan juga keterangan mengenai sumber perolehan data tersebut. Dengan cara ini, orang lain memiliki kesempatan untuk meninjau ulang dan melakukan penafsiran ulang. Oleh karena

alasan inilah, subjektivitas dalam penulisan sejarah diakui keberadaannya, namun tetap harus dihindari. Interpretasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis, yang berarti menguraikan data dengan tujuan menemukan fakta, dan sintesis, yang berarti menggabungkan atau mengelompokkan beragam data guna menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu fakta.⁴³ Tahapan interpretasi ini digunakan untuk menganalisis eksistensi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dari masa Orde Lama sampai masa Reformasi, yang dimulai dari tahun 1955 sampai tahun 2016.

Teori yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah teori gerakan sosial, khususnya pendekatan *political opportunity structure* (struktur kesempatan politik) yang dikembangkan oleh para ahli gerakan sosial seperti Sidney Tarrow pada tahun 1998 dan Doug McAdam pada tahun 1982. Menurut Tarrow, pendekatan *political opportunity structure* menekankan bahwa muncul, berkembang, atau melemahnya suatu gerakan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor sosial atau ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika kontestasi dan struktur kesempatan politik yang tersedia di dalam suatu sistem politik tersebut. Dalam bukunya, Tarrow menjelaskan rumusan konseptualnya sebagai berikut:

“..., saya berpendapat bahwa kontestasi lebih erat kaitannya dengan kesempatan (dan dibatasi oleh kendala) bagi tindakan kolektif daripada oleh faktor-faktor sosial atau ekonomi persisten yang dialami oleh masyarakat. Kontestasi meningkat ketika orang-orang memperoleh sumber daya eksternal untuk melepaskan diri dari kepatuhan mereka dan menemukan kesempatan di mana mereka dapat menggunakannya. Hal ini juga meningkat ketika mereka dihadapkan pada biaya-biaya yang tidak dapat mereka tanggung atau yang menyinggung rasa keadilan mereka. Ketika akses institusional terbuka, keretakan muncul di dalam kelompok elite, sekutu menjadi tersedia, dan kapasitas negara untuk melakukan represi menurun, para penantang menemukan peluang untuk memajukan klaim-klaim mereka. Ketika digabungkan dengan tingginya persepsi terhadap biaya akibat ketidakaktifan (diam), kesempatan-kesempatan ini menghasilkan episode-episode politik kontestatif.”⁴⁴

⁴³ Kuntowijoyo, “Pengantar Ilmu Sejarah”, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 78-79.

⁴⁴ Sidney Tarrow, “Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 71.

Sementara itu, menurut McAdam, kerangka teori ini berangkat dari asumsi bahwa perubahan dalam struktur politik, seperti meningkatnya akses kelompok masyarakat terhadap ruang publik, munculnya keretakan di kalangan elite, melemahnya kapasitas represi negara, hingga terbukanya sistem politik akibat tren sosio-ekonomi makro, akan menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok sosial untuk melakukan mobilisasi. Sebaliknya, sistem politik yang tertutup dan represif akan membatasi ruang gerak serta meredam potensi protes sosial tersebut.⁴⁵ McAdam menulis dalam bukunya, bahwa:

“...kemunculan aktivitas protes yang meluas merupakan hasil dari kombinasi antara meluasnya kesempatan politik dan organisasi yang tumbuh dari dalam, yang dimediasi melalui suatu proses krusial berupa atribusi kolektif. Seiring waktu, faktor-faktor yang sama ini terus membentuk perkembangan pemberontakan, bersama dengan satu faktor tambahan, yakni perubahan respons pengendalian sosial dari kelompok-kelompok lain terhadap gerakan tersebut.”⁴⁶

Dalam konteks sejarah perburuan di Indonesia, penerapan teori ini sangat relevan untuk membedah pasang surut eksistensi Sarbumusi secara utuh dari tahun 1955 hingga 2016. Pada Masa Orde Lama (1955-1966), iklim politik yang didominasi sistem multi-partai memberikan struktur kesempatan politik yang terbuka. Kondisi ini memfasilitasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendirikan Sarbumusi sebagai alat mobilisasi massa untuk menandingi manuver ideologis SOBSI/PKI, yang pada akhirnya membawa Sarbumusi pada puncak kejayaannya.

Sebaliknya, pada Masa Orde Baru (1966-1998), negara menerapkan struktur kesempatan politik yang sangat tertutup. Kuatnya kontrol negara melalui kebijakan serikat buruh tunggal (penggabungan paksa ke dalam FBSI dan SPSI), depolitisasi aparatur sipil, serta pengawasan militeristik yang represif menyebabkan Sarbumusi kehilangan kemandiriannya dan tidak memiliki ruang yang memadai untuk berkembang secara organisatoris. Kondisi ini memaksa Sarbumusi mengalami kelumpuhan fungsional di pentas perburuan nasional.

⁴⁵ Doug McAdam, *“Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970”*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 39-43.

⁴⁶ Doug McAdam, *“Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970”*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 2.

Perubahan konstelasi yang radikal kemudian terjadi setelah runtuhnya Orde Baru. Masa Reformasi (1998-2016) membawa momentum struktural berupa terbukanya kembali ruang demokrasi dan diakuinya kebebasan berserikat, yang ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87. Dalam perspektif *political opportunity structure*, pelanggaran kontrol represif ini dipahami sebagai terbukanya kesempatan politik baru yang sukses dimanfaatkan oleh Sarbumusi untuk bangkit (re-organisasi internal), memulihkan statusnya sebagai Badan Otonom NU, dan memformulasikan strategi perjuangan baru hingga bertransformasi menjadi Konfederasi pada tahun 2016.

Dengan demikian, teori *political opportunity structure* memberikan kerangka analisis yang komprehensif bagi penulis untuk menjelaskan dinamika eksistensi Sarbumusi sebagai sebuah proses historis, kontekstual, dan fluktuatif yang tidak terlepas dari interaksi antara kapasitas internal organisasi dengan tarik-ulur kebijakan negara dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

4. Historiografi

Dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan (historiografi) itu merupakan paparan, penyajian, presentasi, atau penampilan (eksposisi) yang sampai dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah. Paling tidak ada tiga teknik dasar tulis-menulis yang digunakan secara bersamaan yaitu deskripsi, narasi, dan analisis.⁴⁷

Dalam historiografi, gaya deskriptif-naratif dan analitis-kritis sering terlihat sebagai dua pandangan yang sangat ekstrem, dan masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Namun, dalam perkembangan penulisan sejarah akhir-akhir ini, muncul beberapa sejarawan yang cenderung lebih moderat dan berusaha mengambil jalan tengah di antara dua pandangan ekstrem tersebut. Sehubungan dengan kecenderungan ini, maka cara pemaparan atau penyajian sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu deskriptif-naratif, analitis-kritis, serta gabungan: deskriptif-naratif dan analitis-kritis. Meskipun demikian, apa pun bentuk penampilan, penyampaian, atau pemaparan yang digunakan, pada akhirnya

⁴⁷ Helius Samsuddin, *"Metodologi Sejarah"*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 150.

semuanya tetap mengarah kepada sintesis yang kita kenal sebagai historiografi atau penulisan sejarah.⁴⁸

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah penelitian sekaligus menjadi landasan bagi bab-bab berikutnya.

BAB II Pembahasan. Bab ini membahas tentang sejarah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) pada masa Orde Lama yang dimulai dari tahun 1955 sampai tahun 1966. Fokus utama bab ini antara lain membahas sejarah berdirinya Sarbumusi, dan eksistensi Sarbumusi pada Periode Moertadji Bisri dan K.H. Masykur.

BAB III Pembahasan. Bab ini membahas tentang eksistensi Sarbumusi pada masa Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Fokus utama dalam bab ini yaitu membahas eksistensi Sarbumusi pada Periode Sutanto Martoprasono, eksistensi Sarbumusi setelah penggabungan serikat buruh pada masa Orde Baru, peran Nahdlatul Ulama pada masa Orde Baru sebagai organisasi induk dari Sarbumusi, serta membahas fase krisis dan runtuhnya rezim Orde Baru.

BAB IV Pembahasan. Bab ini membahas tentang kebangkitan dan eksistensi Sarbumusi pada masa Reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai tahun 2016. Adapun fokus utama dalam bab ini yaitu membahas kebangkitan Sarbumusi, eksistensi Sarbumusi pada Periode H. Djunaidi Ali dan H. M. Syaiful Bahri Anshori, serta membahas perubahan bentuk organisasi Sarbumusi dari Federasi menjadi Konfederasi Sarbumusi yang disahkan pada tahun 2016.

BAB V Penutup. Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan, jawaban atas seluruh pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, saran, daftar sumber serta lampiran-lampiran.

⁴⁸ Helius Sjamsuddin, *"Metodologi Sejarah"*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 151-152.